

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

---

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**NOMOR:**

Dasar :.....  
.....

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
  
: 2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

Pejabat yang berwenang

---

( NAMA )  
NIP

---

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :1, 2

Kode No. :Nomor:

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

1. Pejabat yang member perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan	
b. Jabatan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	
b. Tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	
b. Tanggal berangkat	
c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Perangkat Daerah	
b. Kode Rekening	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :  
pada tanggal :

Pejabat yang berwenang

( NAMA )  
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

SPPD No. :  
Berangkat dari :  
Pada tanggal :  
Ke :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( NAMA )  
II. Tiba di : Berangkat dari:  
Pada tanggal : Ke :  
Kepala Pada tanggal :  
Kepala

---

III. Tiba di : Berangkat dari:  
Pada tanggal : Ke :  
Kepala Pada tanggal :  
Kepala

---

IV. Tiba di : Berangkat dari:  
Pada tanggal : Ke :  
Kepala Pada tanggal :  
Kepala

---

V.Tiba kembali di :  
Pada tanggal :  
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang berwenang

---

( NAMA )  
NIP

#### VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor:

Tanggal:

NO	PERINCIANBIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
JUMLAH : Terbilang		Rp	

.....(tanggal, bulan, tahun)  
Telah dibayar sejumlah Rp.....  
Bendahara Pengeluaran  
Rp.....  
Yang  
Menerima

(.....) NIP (.....) NIP

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah: Rp.....  
Yang telah dibayar semula: Rp.....  
Sisa kurang/lebih: Rp.....

Pejabat Yang Berwenang

(.....)  
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya dan/ atau biaya tiket pesawat melebihi standar yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Juml
		Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka diatas benar-benar dilakukan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: ..... , tanggal, bulan, tahun  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana SPPD,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PENUNDAAN TUGAS PERJALANAN DINAS**  
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Kerja : .....(4)  
OPD : .....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Kerja : .....(9)  
OPD : .....(10)

Pembatalan/penundaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/  
Perintah Gubernur/perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD yaitu  
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat  
digantikan oleh ASN dan Non ASN lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian  
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan  
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
UnitKerja : ..... (4)  
OPD : ..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:.....tanggal.....dan SPPD Nomor:.....tanggal.....  
atas nama:

Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Unit Kerja : ..... (9)  
OPD : ..... (10)

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas  
Nomor:.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....(11)....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:.....tanggal.....Unit Kerja.....(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

---

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH